

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Indonesia menempati peringkat ke 4 dengan Negara jumlah penduduk terbanyak, dilihat dari laporan Worldmeters pada tahun 2020 tercatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 274,86 juta jiwa per tanggal 14 Desember 2020. Menurut hasil proyeksi Badan Pusat statistik (BPS) penduduk Indonesia dari tahun 2000-2025 akan terus mengalami peningkatan sebesar 24,92% . Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan sebuah potensi yang harusnya dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Tetapi banyak sekali factor yang menyebabkan sebagian besar penduduk Indonesia mengalami tingkat ekonomi yang rendah atau miskin yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami keterlambatan.

Di Indonesia tingkat kemiskinan merupakan satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduknya dan menekan suatu pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Menurut Yacob (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan banyak dihadapi oleh berbagai Negara. Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan sebuah masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan.

Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi social ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan social dan politik.

Dalam jurnal *Economics Development Analysis Journal* (2013 : 114) World Bank (2004) menyapaikan bahwa salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan asset untuk memenuhi kebutuhandasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat

kesehatan, dan pendidikan yang dapat diterima. Disamping itu juga kemiskinan berkaitan dengan adanya keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan yang dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dalam jurnal *social humaniora Adisasmita* juga menyampaikan (2005) bahwa indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, moralitas anak usia balit, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata rata, tingkat penyerapan anak sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan, air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan perkapita, dan distribusi pendapatan. Pada hakikatnya tolak ukur kemiskinan bukan hanya dilihat dari tingkat pendapatan yang rendah dan tingkat kesehatan yang rendah, akan tetapi melihat dari tingkat pendidikan penduduknya dan juga perlakuan adil dimuka hukum dan sebagainya.

Dalam kemiskinan faktor yang sangat mempengaruhi yaitu faktor sumber daya manusia yang kurang. Hal tersebut di karenakan masih terdapat banyak usia produktif sekolah tetapi tidak ada dalam system sekolah. Sebagian besar dari mereka yang tidak berada dalam system persekolahan biasanya diakibatkan oleh kendala biaya yang mereka alami sehingga mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan system persekolahan. Hal tersebut yang menyebabkan sumber daya manusia di Indonesia masih sangat rendah sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak memiliki keterampilan untuk mereka bekerja. Perlu diadakannya pemilik berdayaan pada masyarakat miskin agar tidak terjadi kesenjangan social yang terus menerus dalam kehidupan social di masyarakat. Pemerintah banyak sekali mengadakan program program untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia, baik itu pemerintahan pusat maupun daerah. Pemerintah banyak mengadakan program untuk memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki keterampilan untuk bekerja agar nantinya masyarakat miskin tersebut mampu menaikkan derajat keluarganya dan menanggulangi kesenjangan social yang terjadi di lingkungannya.

Salah satu aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah dengan adanya data penduduk miskin yang akurat. Ketika data tersebut telah tersedia maka pemerintah dengan mudah dapat mengambil keputusan yang harus dilakukan untuk penanggulangan masalah kemiskinan tersebut. Selama ini pemerintah Indonesia banyak

sekali mengeluarkan program program untuk pengentasan kemiskinan yang ada dengan salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan social, tahun 2007 pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Dijelaskan dalam pedoman umum PKH bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka mempertahankan daya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial pada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan social penduduk miskin sekaligus memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Dalam pedoman umum PKH tahun 2012 Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam kluster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan ini merupakan bagian bagian dari program penanggulangan kemiskinan. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan social dan di tetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Menurut Sarman (2000) Program Keluarga Harapan adalah sebuah kebijakan program yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan penduduk di Indonesia. Secara umum konsep kebijakan hamper selalu dikaitkan dengan keputusan tetap yang bersifat konsisten dan merupakan pengulangan tingkah laku dari yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Sementara itu dalam Pedoman PKH 2012 dijelaskan tujuan diadakannya program keluarga harapan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selian itu juga memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran

konsumsi. PKH juga diharapkan dapat mengubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memeriksakan ibu hamil atau balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan. Selain itu, dalam jangka panjang juga PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Selain itu, tujuan jangka pendek program keluarga harapan ini adalah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin yang dimana bantuan tersebut merupakan bantuan social yang berupa uang tunai maupun kebutuhan pangan. Dengan adanya PKH diharapkan peserta PKH memiliki akses untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin.

Bantuan yang disalurkan kepada peserta PKH bersumber dari APBN, dan untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan di Kabupaten atau Kota perlu adanya dukungan dari APBD. Pelaksanaan program PKH ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam upaya memutus rantai kemiskinan bagi masyarakat, yang dimana program keluarga harapan ini tidak hanya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima PKH saja tetapi dapat merubah pola hidup dan perilaku yang menyangkut pendidikan dan kesehatan yang dapat berdampak luas kepada masyarakat di wilayah dilaksanakannya program ini.

Dalam Program Keluarga Harapan bantuan yang telah diberikan kepada keluarga penerima manfaat diharapkan untuk bisa menyekolahkan anak anaknya dan juga bantuan ini dapat digunakan untuk mengurangi beban tanggungan pengeluaran keluarga. Dengan adanya Program Keluarga Harapan ini diharapkan para masyarakat miskin memiliki akses yang sangat baik untuk memanfaatkan pelayanan social seperti kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi, termasuk juga menghilangkan kesenjangan social yang ada dan ketidakberdayaan serta keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin. Peserta Program Keluarga Harapan memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya dibidang kesehatan dan pendidikan.

Program Keluarga Harapan sudah berjalan di berbagai Provinsi di Indonesia termasuk Jawa Barat khususnya di Kabupaten Kuningan. Sejak tahun 2021 setelah meningkatnya masa pandemic Covid 19 ini Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Kuningan sudah mencapai angka 10 ribu keluarga yang di dalamnya termasuk masyarakat miskin dari Kelurahan Kuningan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kuningan salah satunya

dengan adanya sosialisasi kepada tiap ketua RT yang berada di lingkungan Kelurahan Kuningan. Selain itu, ketua RT memberikan rekomendasi kepada Kelurahan mengenai data warga miskin yang dipilih untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kuningan yang menjadi sasaran utamanya adalah keluarga sangat miskin yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian social. Di Kelurahan Kuningan sendiri yang menerima bantuan program tersebut masih belum cukup merata, masih banyak sekali masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari program tersebut.

Selain sasaran yang belum tepat yang menjadi permasalahan di Kelurahan Kuningan juga yaitu jumlah bantuan yang belum bisa menutupi kebutuhan hidup para penerima bantuan. Harga bahan pokok yang semakin hari semakin meningkat yang menyebabkan jumlah bantuan tersebut tidak bisa menutupi kebutuhan keluarga mereka.

Di wilayah Kelurahan Kuningan sendiri Program Keluarga Harapan sudah berjalan sejak kementerian social mengadakan program ini. Namun sayangnya masih banyak keluarga miskin yang kebutuhannya tidak tercukupi meskipun sudah diberi bantuan social. Dengan kondisi seperti sekarang, segala bentuk bahan pokok mengalami kenaikan tidak sebanding dengan bantuan social yang diberikan oleh pemerintah. Masih banyak sekali warga miskin yang mengeluhkan mengenai bantuan social yang tidak bisa menutupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, di wilayah kelurahan kuningan masih belum merata mengenai pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, masih cukup banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan social dari program keluarga harapan tersebut. Selain itu, di Kelurahan Kuningan juga koordinasi antara pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih kurang efisien sehinggalah serigkali menimbulkan kesalahpahaman antara pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat tersebut.

Selain mengenai bantuan yang diterima tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam pelaksanaannya Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kuningan masih sangat jauh dari yang diharapkan. Masih banyak masyarakat miskin yang sulit memahami bagaimana pelayanan secara administrasi di bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga masih banyak sekali masyarakat miskin yang anak anaknya tidak mengikuti pembelajaran di sekolah karena belum memahami bagaimana prosedur untuk pelayanan administrative Program Keluarga Harapan ini. Sehingga menyebabkan kemampuan yang mereka miliki

sangat minim. Karena keteremapilan mereka yang sangat minim mereka juga akan sulit mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan keluarganya sehingga kesenjangan social akan terus terjadi di lingkungan sekitar mereka. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) tak jarang juga menimbulkan rasa malas untuk para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan diberikannya bantuan seringkali para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menggantungkan hidupnya pada dana bantuan.

Program program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak yang besar dalam menanggulangi kemiskinan sehingga sampai saat ini tujuan dari program keluarga harapan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan yang dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian '**Penyaluran Bantuan Sosial melalui Program Keluarga Harapan dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan Keluarga (Studi Pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kuningan )**'

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dengan sebagaimana diuraikan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya yaitu :

1. Koordinasi antara pendamping dengan penerima manfaat belum cukup efisien
2. Dana bantuan yang diberikan belum memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga
3. Penyaluran bantuan social dari program keluarga harapan masih belum tepat sasaran
4. Belum mandiri penerima manfaat yang selalu menggantungkan kebutuhan hidupnya pada dana bantuan

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) sudah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga penerima manfaat di Kelurahan Kuningan?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu untuk mengetahui Penyaluran program keluarga harapan melalui pemberian bantuan social kepada masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di Kelurahan Kuningan.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa kegunaan penelitian ini adalah :

### **1.5.1 Bagi Peneliti**

Penelitian ini dilakukan peneliti untuk memenuhi syarat untuk mengikuti seminar proposal.

### **1.5.2 Bagi Instansi**

Penelitian ini dilakukan untuk bahan evaluasi Program Keluarga Harapan mengenai terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan social yang telah di salurkan

### **1.5.3 Bagi Universitas**

Penelitian ini dilakukan untuk menambah referensi dan literature mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian penelitian.

## **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalah pemahaman dan perbedaan penafsiran dengan istilah istilah dalam judul proposal ini. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Penyaluran Bantuan Sosial melalui Program Keluarga Harapan dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan Keluarga (Studi Pada Keluarga Miskin Sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH Di Kelurahan Kuningan )” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

### **1.6.1 Program Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan ( PKH ) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin, jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan ini merupakan suatu program yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan yang ada.

Kedudukan Program Keluarga Harapan merupakan suatu bagian dari program program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program keluarga harapan berada dibawah koordinasi penanggulangan kemiskinan, baik di pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera

dibentuk tim pengendali program keluarga harapan ini agar terjadi sinergi koordinasi yang baik.

#### 1.6.2 Bantuan Sosial

Bantuan social adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social.

Bantuan social sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko social, meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat.

#### 1.6.3 Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKH dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat agar dapat memperbaiki kualitas kehidupan serta mengembangkan segala kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Dimana implementasi itu dilaksanakan melalui 3 bidang penting PKH yaitu bidang kesehatan, dengan kemauan dan peningkatan kepedulian terhadap keadaan kesehatan keluarga. Dengan menyukseskan program posyandu dan kepedulian terhadap ibu hamil serta balita dalam keluarga. Bidang pendidikan, keluarga menjadi lebih memperhatikan akan keperluan dan kebutuhan anak dalam menimba ilmu di bangku sekolah. Bidang kesejahteraan sosial, dimana merupakan hal yang sangat baru dalam program ini dengan tujuan memandirikan para peserta PKH dengan pembentukan kelompok usaha